

INTEGRASI BANGSA DAN PENDIDIKAN

Oleh: P.J.Suwarno¹

Pendahuluan

Integrasi bangsa Indonesia dikumandangkan secara eksplisit untuk pertama kali di Indonesia oleh pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam suatu Sumpah Pemuda yang menyatakan berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, bertanah air satu yaitu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Gagasan ini sudah pernah dicetuskan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1925.

Gagasan itu terus berkembang, karena sebenarnya gagasan nasionalisme sudah mulai bersemi pada tahun 1908, ketika di Yogyakarta didirikan Budi Utomo, kemudian disusul Sarekat Islam, yang skalanya bukan hanya meliputi Jawa, tetapi sudah mencakup seluruh Indonesia. Kemudian disusul *Indische Partij* yang tujuan nasionalismenya dinyatakan secara eksplisit, sehingga akhirnya mendapat kesulitan dengan pemerintah Hindia Belanda, dan para pendirinya ditangkap dibuang ke negeri Belanda.

Namun gerakan nasional itu tidak surut, bahkan Sukarno dan kawan-kawan mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, yang tujuannya melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, bahkan setahun kemudian disusul Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh Pemuda Indonesia yang sedang berkongres di Batavia pada tahun 1928. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda bertindak keras untuk mempertahankan *Pax Neerlandica*, dan pada tahun 1930-an banyak tokoh nasionalis radikal yang ditangkap dan dibuang ke luar Jawa dan partainya dibubarkan.

¹ Guru Besar Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Namun nasionalisme yang diajarkan oleh partai-partai tersebut sudah terlanjur tersebar luas di antara kalangan rakyat jelata. Mereka berhimpun dalam partai-partai politik yang sifatnya lebih lunak. Mereka juga dipimpin oleh kelompok intelektual juga, tetapi yang tidak menolak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Diantara mereka ada yang menjadi pegawai negeri Belanda, dan menjadi anggota *Volksraad* semacam Parlemen yang didirikan oleh Belanda untuk Hindia Belanda. Mereka inilah yang disebut kelompok intelektual Indonesia yang kooperatif.

Jadi pada zaman Belanda politik etik yang dilancarkan oleh Belanda pada tahun 1901 dulu telah menghasilkan kelompok intelektual pribumi yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok nasionalis yang non-kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda dan kelompok intelektual yang mau bekerjasama dengan Belanda atau kelompok kooperatif yang biasanya bekerja sebagai pegawai *pangreh praja* (*binnenlandsch bestuur*).

Ketika Jepang mengusir Belanda dari Indonesia pada tahun 1942, maka Jepang mendaftarkan semua kelompok terpelajar termasuk pangreh praja pada zaman Belanda. Baik pada mereka dulu termasuk kelompok kooperator maupun kelompok non kooperator didaftarkan dan dikumpulkan dimanfaatkan untuk mengobarkan semangat anti sekutu termasuk Belanda dan sekaligus mempropagandakan nasionalisme. Kecuali itu Jepang merekrut pemuda dan orang dewasa untuk menghadapi pihak sekutu. Mereka dilatih baris berbaris sebagai *Seinendan* dan *Keibodan* dan diberi latihan militer sebagai *Heiho* dan kemudian Pembela Tanah Air (Peta). Kecuali dilatih kemiliteran mereka juga diindoktrinasi tentang nasionalisme untuk melawan penjajah, dalam hal ini sekutu terutama Belanda.

Pada bulan Agustus 1945 rakyat Indonesia yang mendapat bekal pendidikan dari Belanda bagi mereka yang dapat digolongkan sebagai kelompok Nasionalis, dan kelompok birokrat intelektual, yang dulunya digolongkan kelompok kooperator beserta para pemimpin rakyat beserta rakyat jelata pada zaman Jepang itu mendapat indoktrinasi nasionalisme, akhirnya ditinggalkan oleh Jepang yang sudah menyerah

kalah pada tanggal 15 Agustus 1945, sedangkan pihak sekutu menjadi pihak pemenang dalam perang dunia II itu belum sampai di Indonesia khususnya di Jawa.

Maka atas desakan kelompok pemuda, maka kelompok intelektual yang dipimpin Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1945. Seperti yang diucapkan oleh Sukarno dalam pidato yang mengiringi proklamasi bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945 itu akan terus berlangsung sampai lebur kiamat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan yang dibuka oleh Belanda dengan politik etiknya yang dimulai tahun 1901 sudah menghasilkan kelompok intelektual yang berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan dukungan dari kelompok yang mendapat latihan (pendidikan) militer dari pihak Jepang yang nanti menjadi *cikal bakal* kelompok militer Indonesia merdeka.

Dari uraian di atas maka dapat di amati bahwa pendidikan yang dilakukan oleh pihak penjajah dalam hal ini Belanda dan Jepang sudah berhasil melahirkan kelompok elit bangsa Indonesia yang mampu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan kemudian mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Dari fenomena sejarah di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan kolonial dapat melahirkan kelompok intelektual yang patriotis, meskipun tidak seluruhnya. Namun pendidikan Jepang yang menekan semangat nasionalisme untuk melawan pihak sekutu dengan menghadap langsung dengan bahaya yang mengancam itu, akhirnya dapat mengubah kelompok intelektual yang semula kurang kuat semangat nasionalismenya (kooperator) dan rakyat kurang terpelajar menjadi kelompok nasionalis yang handal dalam menghadapi lawan luar, sehingga kemerdekaan itu bertahan sampai sekarang.

Dari fenomena sejarah di atas maka dapatlah digambarkan bahwa pendidikan tidak sendirinya menghasilkan kelompok intelektual yang mempunyai semangat nasionalisme, tetapi sebaliknya semangat cinta tanah air dapat ditanamkan kepada rakyat pada umumnya termasuk rakyat tidak terpelajar sekalipun. Rupanya faktor

bahaya dari luar yang mengancam eksistensi komunitas itu merupakan faktor dominan untuk mendorong nasionalisme baik pada kelompok intelektual maupun kelompok non intelektual.

Untuk menjaga nasionalisme itu bertahan rupanya diperlukan pendidikan yang menyadarkan anggota kelompok bangsa Indonesia ini selalu menyadari faktor yang selalu mengancam integrasi bangsa yang sudah mulai terbentuk menjadi negara pada tahun 1945 itu.

Dalam Integrasi Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

Periode 1945-1949 bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya terhadap tentara Belanda yang mencoba untuk kembali lagi menjajah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang termasuk siswa-siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka berjuang menjadi tentara pelajar yang terkenal keberaniannya. Meskipun dari segi teknis organisatoris Indonesia kalah terhadap tentara Belanda, tetapi dari segi semangat Indonesia pantang mundur. Hal ini ternyata pada akhir tahun 1948, Belanda, yang mengkhianati perjanjian Renville yang disaksikan PBB berhasil menduduki ibu kota RI yang sudah pindah di Yogyakarta sejak tahun 1946. Belanda sudah berhasil membentuk 15 pemerintahan di wilayah Indonesia. Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri RI sudah ditangkap dan dibuang ke pulau Bangka, tetapi RI berhasil membentuk pemerintahan darurat di Sumatera dengan kepala negaranya Mr. Syafruddin Prawiranegara. Wilayahnya hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Barat dan sebagian Sumatera, sisanya diduduki Belanda dan di bawah kepungan tentara RI, yang tersebar di mana-mana. Mereka mengadakan gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.

Dalam situasi demikian akhirnya Amerika Serikat beralih tidak sepenuhnya memihak kepada Belanda, sebab pada tahun 1948 RI yang sedang melawan Belanda itu berhasil menghancurkan pemberontakan PKI yang bermarkas di Madiun. Amerika

Serikat yang semula percaya kepada Belanda kalau dirinya pergi dari Indonesia, PKI akan berontak, tidak percaya lagi dan lebih percaya kepada RI tanpa bantuan dari manapun menghancurkan pemberontakan PKI. Hal ini dinilai positif oleh Amerika Serikat yang sudah mulai terlibat dalam perang dingin dengan Uni Soviet Russia. Maka atas tekanan Amerika Serikat Belanda terpaksa mau menanda tangani persetujuan Rum-Van Rojen, bahwa Belanda, RI, dan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) (Dewan Gabungan 15 Negara boneka bentukan Belanda) akan mengadakan Konferensi Meja Bundar, sesudah pemimpin-pemimpin RI dikembalikan ke Yogyakarta.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan KMB antara tiga negara tersebut (Belanda, RI, dan BFO) di Den Haag. Keputusannya Belanda mengembalikan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), kecuali Irian Barat. Dalam hal ini di Indonesia terjadi konflik antara kelompok politik yang merupakan kelompok terpelajar hasil pendidikan Belanda di bawah pimpinan Sukarno dan Hatta dan kelompok militer hasil pendidikan Jepang, di bawah pimpinan Jendral Sudirman, yang semula menolak KMB dan ingin meneruskan perang gerilya. Belanda terhadap Indonesia dan berdirilah RIS pada tahun 1949 dengan Presiden Sukarno.

Namun rencana Belanda semula dengan RIS masih dapat menguasai Indonesia lewat negara-negara bagian yang berjumlah limabelas tersebut, tetapi ternyata DPR dari negara-negara bagian itu lebih setia kepada RI daripada kepada Belanda, maka tidak mengherankan tidak sampai berumur setahun RIS sudah berubah menjadi negara Kesatuan RI pada tanggal 15 Agustus 1950 dan pengaruh Belanda terhadap Indonesia hilang.

Periode 1950 - 1999

Setelah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat dan DPR dilebur menjadi DPR, presidennya tetap Sukarno dengan wakilnya Mohammad Hatta.

Indonesia menjadi negara demokrasi liberal dengan multi partai. Pendidikan pun diatur sesuai dengan negara-negara bebas dan berorientasi ke negara-negara modern termasuk Amerika Serikat, meskipun pengaruh sistem pendidikan dari Belanda masih bertahan. Mulai banyak mahasiswa yang dikirim ke Amerika Serikat termasuk tentara. Dengan demikian demokrasi mulai tumbuh di Indonesia dan berhasil mengadakan pemilihan umum secara bebas dan rahasia untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante.

Dalam situasi yang bebas itu mulai ada orang-orang yang tidak puas, maka muncullah pemberontakan di daerah-daerah seperti di Jawa Barat DI dan TII yang sudah sejak tahun 1940-an mengadakan pemberontakan, di Sumatera PRRI, di Sulawesi Permesta dan sebagainya. Namun Presiden Sukarno dengan TNI berhasil mengatasi semuanya itu. Akhirnya demokrasi parlementer tidak memuaskan Presiden Sukarno dan pada tanggal 5 Juli 1959 dia mengeluarkan Dekrit Presiden dengan dukungan TNI. Sejak itu kembalilah UUD 1945 berlaku kembali.

Sejak tahun 1959-1999 UUD 1945 berlaku kembali, pada tahun 1959-1965 mendasari negara demokrasi terpimpin, pada tahun 1966-1999 mendasari negara Pancasila, tetapi semuanya lebih menampilkan pemerintah otoriter dari Presiden. Dalam pemerintah Sukarno partai politik masih diberi hak hidup, meskipun harus tunduk kepada pimpinan Sukarno, sedangkan dalam pemerintahan Soeharto partai politik digabungkan (baca dibatasi) menjadi dua yaitu PDI dan PPP, sedangkan yang bebas berkembang adalah Golkar sebagai partai pemerintah dibawah pimpinan Presiden Soeharto.

Para politisi hasil pendidikan Belanda yang pada tahun 1949 dan pada periode 1950-1959 masih membawahkan tentara dalam bidang politik, mulai pemerintah Soeharto (1996), militer hasil pendidikan Jepang tampil sebagai pemegang kekuasaan politik pemerintah. Maka terjadilah penyeragaman-penyeragaman ala militer baik dalam bidang pemerintah, maupun dalam bidang pendidikan. Nasionalisme yang diimpikan Sukarno yaitu keinginan bersama untuk bersatu dan

tetap mempertahankan kesatuan itu kini mati, sebab semua harus mengikuti apa yang diinstruksikan dari pusat.

Dalam bidang pemerintahan di daerah dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur daerah di seluruh Indonesia sama, dari Desa dengan Kepala Desa yang sekaligus menjadi kepala Lembaga Musyawarah Desa, lalu di kabupaten dengan Bupati Kepala Daerah yang memimpin pemerintahan Daerah termasuk DPRD nya dan Gubernur Kepala Daerah yang memimpin Pemerintah Daerah termasuk DPRD nya. Dengan demikian instruksi Presiden akan sampai pada rakyat-rakyat desa di seluruh Indonesia lewat gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa. Kecuali itu Kopkamtib siap mengamankan kelompok masyarakat yang menentang instruksi pemerintah.

Dalam dunia pendidikan dimasukkan Penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, di samping masih ada pelajaran atau mata kuliah Pancasila, dan mahasiswa diwajibkan menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebelum menempuh ujian akhir, sehingga mereka tidak sempat memikirkan mengadakan kritik terhadap pemerintah. Lagi pula masih dikontrol oleh pihak Universitas lewat Pembantu Rektor Tiga. Kurikulum disentralisasi, meskipun muatan lokal tetap diadakan, tetapi yang diuji oleh pusat hanya kurikulum nasional. Kecuali itu buku teks sejarah dari SD sampai Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan Jendral Soeharto dipalsukan, sehingga anak didik, mahasiswa, dan masyarakat mendapat pemahaman bahwa Presiden Soeharto orang hebat yang pantas menjadi Presiden lebih dari dua kali masa jabatan. Kecuali itu meskipun secara yuridis tidak ada diskriminasi agama, tetapi dalam praktek di sekolah-sekolah tertentu kecenderungan diskriminasi agama itu tetap ada. Kadang-kadang terasa juga kecenderungan diskriminasi agama ini di perguruan tinggi negeri yang dosen-dosennya memeluk agama tertentu. Sebaliknya sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan agama tertentu dipaksa untuk mengusahakan pendidikan agama sesuai agama siswanya yang kadang-kadang tak

mungkin diadakan, meskipun siswa dan orang tua menerima pelajaran agama yang diadakan oleh agama sekolah yang bersangkutan

Akhirnya Presiden Soeharto yang memerintah dengan kekuatan Golkar dan militer itu tidak mampu menghadapi krisis moneter yang melanda Asia termasuk Indonesia dan akhirnya pemerintahannya jatuh. Presiden Soeharto toh akhirnya tidak mampu menghadapi krisis moneter yang melanda Asia termasuk Indonesia, dan pada tanggal 21 Mei 1998 mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden yaitu Prof. Dr. B.J. Habibie, sampai tahun 1999.

Pasca Presiden Soeharto

Dengan demikian kesadaran anak-anak sekolah yang kini sudah banyak yang menjadi warga negara dewasa, menjadi tahu bahwa apa yang diyakini dalam pendidikan dulu banyak yang palsu, setelah mereka mengetahui keadaan Jendral Soeharto yang sesungguhnya. Maka wajar kalau setelah Soeharto lengser tidak menjadi Presiden lagi timbul kerusuhan di mana-mana, bahkan di Aceh, Irian Jaya, dan Riau berniat untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Keuangan Daerah. Kedua UU ini berusaha mengubah UU No. 5/1974 yang sentralistis dan otoriter menjadi lebih demokratis dan desentralistis. Titik berat otonomi diletakkan di Kabupaten dan Kota. Dengan demikian pendidikan akan ikut didesentralisasikan sesuai dengan gerakan otonomi daerah, meskipun fungsi Departemen Pendidikan masih tetap dipertahankan, terutama untuk menjaga mutu pengajaran, setidaknya untuk awal pelaksanaan desentralisasi ini.

Namun masalah yang lebih penting yaitu bagaimana mempertahankan dan melestarikan integrasi bangsa Indonesia, sehingga tidak terpecah belah dalam daerah-daerah yang kecil-kecil, sehingga muncul ratusan suku bangsa yang berdiri sendiri

menjadi negara merdeka lepas satu dari yang lainnya? Dalam hal ini apakah pendidikan dapat dijadikan salah satu sarana untuk mencegah kekhawatiran itu? Dalam pendidikan kita masih mempunyai Pancasila dan UUD 1945, sejarah nasional minus sejarah yang dipalsukan oleh Presiden Soeharto beserta rezimnya, dan bahasa Indonesia yang menjadi penghantar seluruh rakyat Indonesia. Kiranya itu cukup kalau diajarkan secara benar dan penuh kesungguhan, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban kurikuler.

Di samping itu tidak kalah pentingnya penegakan demokrasi yang sesungguhnya dalam pemerintah daerah yang kini sudah diarahkan ke pelaksanaan desentralisasi yang sungguh-sungguh lewat Undang-undang No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Kalau UU itu dapat dilaksanakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan rapi dan lurus, maka pengaturan pemerintah tingkat atas seperti propinsi dan pemerintah pusat dapat menyusul. Jadi untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang *top down* dan otoriter dari pemerintahan yang lalu harus dijungkirbalikkan menjadi *bottom up* dan demokratis dari desa-desa, kabupaten-kabupaten dan kota-kota. Untuk menunjang kecepatan revolusi ini maka dihimbau agar daerah-daerah supaya segera meningkatkan anggaran pendidikan di daerah masing-masing, lebih-lebih daerah-daerah yang dari sumber alamnya cukup kaya dengan minimal di atas 10% dari seluruh APBD.

Dengan Otonomi seluas-luasnya untuk daerah kabupaten dan kota berarti bupati dan walikota merupakan pilihan DPRD yang sungguh-sungguh dikehendaki rakyat, dan kalau tindakannya dalam menjalankan peraturan daerah tidak sesuai dengan badan legislatif dalam hal ini DPRD, maka DPRD dapat mengusulkan agar bupati diturunkan dari jabatannya. Demikian juga dengan walikota, DPRD kota juga dapat mengusulkan pemberhentian walikota yang tidak menjalankan kekuasaan eksekutif yang sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat DPRD. Sistem pemerintahan yang demikian juga berlaku di desa-desa dengan otonomi asli.

Sistem pemerintahan yang ditawarkan oleh UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 itu menghentikan sistem pemerintahan daerah sentralistik otoriter seperti yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto dulu. Meskipun pada waktu sekarang yang masih agak ragu-ragu melaksanakan perubahan itu justru pemerintah pusat dengan memperlambat peraturan pemerintah yang menerapkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 itu hendaknya segera diatasi, sebab akibat dari pelaksanaan dari kedua UU tersebut justru akan memacu daerah-daerah menjadi lebih bebas mengelola daerah masing-masing, sehingga akhirnya terpacu untuk berhubungan dengan daerah-daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhan, mungkin saja daerah yang mempunyai kekayaan alam tetapi kekurangan tenaga ahli akan mendatangkan tenaga ahli dari daerah lain, mungkin ada daerah yang kaya dalam bidang perkebunan, tetapi kekurangan tenaga kerja, maka dapat mendatangkan tenaga kerja dari daerah miskin yang memiliki tenaga kerja melimpah.

Mungkin dalam hal tersebut di atas pemerintah pusat dan pemerintah propinsi perlu memikirkan kelancaran komunikasi antar kabupaten dan kota yang berada di wilayahnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat terwujud. Hal itu sangat penting untuk berlangsungnya integrasi nasional, yang berupa menyatunya kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang politiko-historis, sosio-kultural, interaksi (transportasi dan komunikasi), dan ekonomi, yang akhirnya akan mempunyai identitas yang berbeda dengan negara lain. Dalam hal ini sangat perlu pemerintah pusat mengusahakan pendidikan Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, dan Pancasila di setiap daerah seperti yang telah diuraikan di atas.

Lembaga pendidikan harus dibersihkan dari tindakan diskriminatif dan tidak eksklusif, sehingga manusia mudah menikmati kesetaraan dan kesamaan hak asasi sejak di bangku sekolah. Dengan demikian mereka akan belajar menghormati hak asasi sesamanya sejak di bangku sekolah, dan sesudah dewasa tidak akan kesulitan membangun kehidupan demokratis baik di dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan.

Memang semuanya baru dimulai, namun hal itu dilaksanakan dengan kesungguhan, tentu keadaan akan berubah, dan kalau dalam pelaksanaan terjadi hal-hal yang tidak seperti yang dikehendaki oleh rakyat, maka dapat diadakan perubahan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

Penutup

Dari puing-puing yang ditinggalkan oleh Pemerintah Soeharto sekarang ini orang masih dapat meletakkan harapan pada upaya membangkitkan semangat nasionalisme yang akan menciptakan integrasi bangsa lewat upaya mengubah sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi desentralistis. Usaha ini dapat ditunjang dengan menaikkan anggaran pendidikan bagi daerah-daerah yang secara ekonomis mampu dan mempertahankan setidaknya-tidaknya tiga mata pelajaran yang memberi wawasan nasionalisme kepada para siswa yaitu Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, yang sudah dibersihkan dari pemalsuan sejarah yang berkaitan dengan Soeharto, dan Pancasila beserta UUD 1945. Hal ini sebaiknya inisiatifnya dari pemerintah pusat bersamaan dengan usaha-usaha faktor integrasi seperti telah disebut di atas. Mungkin kesadaran bahaya disintegrasi bangsa perlu dikemukakan kalau pendidikan meninggalkan tiga pokok bahasan tersebut, yaitu Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia dan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Alfian, 1971 : *Hasil Pemilihan Umum 1995 untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*, Leknas (Lembaga Ekonomi dan Kemasjarkatan Nasional), Djakarta.
- Birch, Anthony H., 1989 : *Nationalism dan National Integration*, Unwin Hyman, London, Sydney, Wellington.
- Biro Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1999/2000 : *Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan*

Peraturan Pelaksanaannya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Desa, Yogyakarta.

- Feith, Herbert, 1978 : *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Fifth Printing, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Gunseikanbu, 1986 : *Orang Indonesia Yang Terkemuka di Jawa*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kahin, George Mc Turnam, 1970 : *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Nagazumi, Akira, 1989 : *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908 – 1918*, Terjemahan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., 1989 : *Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.
- Subagyo I.N. (Penyunting), 1987 : *Perjuangan Pelajar IPI-IPPI*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sujanto, Achmad Noerdin, dan H. Sumarno, 1977 : *Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Proses Kelahirannya*, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.